

**PENGEMBANGAN PARAWISATA BAHARI BERBASIS *BLUE ECONOMY******DEVELOPMENT OF MARINE TOURISM BASED ON BLUE ECONOMY*****Revika Indrayani Kustiwa¹, Eliyanti Mokodompit²**

Universitas Halu Oleo, Indonesia

Email: revika.indrayani@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 14-05-2025

Revised : 26-05-2025

Accepted : 28-05-2025

Published : 30-05-2025

Abstract

Indonesia has great potential in developing sustainable marine tourism, along with its rich marine resources and strategic position in the world's coral triangle. In facing the challenges of environmental degradation and socio-economic inequality, the blue economy approach has emerged as a new development paradigm that prioritizes a balance between economic growth, marine ecosystem preservation, and coastal community empowerment. This study aims to analyze the potential, challenges, and strategies for developing marine tourism based on the blue economy, with a focus on the Southeast Sulawesi region, especially Wakatobi National Park. The method used is descriptive-qualitative through literature studies and analysis of national policy documents and local case studies. The results of the study indicate that the successful implementation of the blue economy in the tourism sector requires synergy between the government, community, and private sector through integrative policies, strengthening local capacity, and utilizing conservation technology. The concept of the blue economy has proven to be a sustainable development strategy that not only maintains marine ecosystems, but also improves community welfare in the long term.

Keywords: *Marine Tourism; blue economy; sustainability*

Abstract

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan, seiring dengan kekayaan sumber daya laut dan posisi strategis dalam segitiga karang dunia. Dalam menghadapi tantangan degradasi lingkungan dan ketimpangan sosial-ekonomi, pendekatan *blue economy* muncul sebagai paradigma pembangunan baru yang mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian ekosistem laut, dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi, tantangan, dan strategi pengembangan pariwisata bahari berbasis *blue economy*, dengan fokus pada wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya Taman Nasional Wakatobi. Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan nasional serta studi kasus lokal. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *blue economy* dalam sektor pariwisata memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta melalui kebijakan integratif, penguatan kapasitas lokal, serta pemanfaatan teknologi konservasi. Konsep *blue economy* terbukti mampu menjadi strategi pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya menjaga ekosistem laut, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang.

Keywords: *Pariwisata Bahari; blue economy; keberlanjutan*

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 95.000 km dan wilayah laut yang mencakup dua pertiga dari total luas wilayahnya. Kekayaan sumber daya kelautan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi ekonomi bahari terbesar di dunia. Namun, pemanfaatan potensi ini masih belum optimal, terutama pada sektor pariwisata



bahari yang memiliki daya tarik global namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan dan keberlanjutan. Pariwisata bahari konvensional seringkali mengejar keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan sosial, seperti kerusakan ekosistem terumbu karang, pencemaran laut, dan marginalisasi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial secara berkelanjutan.

Blue economy atau ekonomi biru hadir sebagai paradigma pembangunan baru yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Konsep ini relevan dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan ekonomi. Penerapan *blue economy* di sektor pariwisata bahari tidak hanya bertujuan untuk menarik wisatawan, tetapi juga sebagai strategi konservasi laut, peningkatan kapasitas masyarakat lokal, dan penguatan kelembagaan. Dengan demikian, *blue economy* menjadi kerangka pembangunan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan ramah lingkungan.

Dalam konteks ini, Sulawesi Tenggara menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata bahari berbasis *blue economy*. Wilayah ini didominasi oleh kawasan perairan, dengan 16 dari 17 kabupaten/kota merupakan wilayah pesisir atau kepulauan. Salah satu destinasi unggulan adalah Taman Nasional Wakatobi yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Keberadaan Wakatobi yang berada di pusat segitiga terumbu karang dunia menempatkannya sebagai prioritas global untuk konservasi laut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi dan strategi pengembangan pariwisata bahari berbasis *blue economy* dengan pendekatan keberlanjutan yang terintegrasi, serta menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan maritim yang inklusif dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORITIS

a. Konsep *Blue economy*

Blue economy merupakan pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan laut dan kesejahteraan sosial masyarakat pesisir. Menurut World Bank (2017), *blue economy* didefinisikan sebagai "*the sustainable use of ocean resources for economic growth, improved livelihoods, and jobs while preserving the health of ocean ecosystems*". Konsep ini lahir sebagai respons terhadap praktik ekonomi konvensional yang cenderung merusak ekosistem laut melalui eksploitasi berlebihan dan pencemaran.

b. Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Prinsip pembangunan berkelanjutan menekankan pada tiga dimensi utama yaitu: pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan pendekatan *Triple Bottom Line* (Elkington, 1997) yang mengukur keberhasilan pembangunan berdasarkan tiga indikator: *profit* (keuntungan ekonomi), *planet* (kelestarian lingkungan), dan *people* (kesejahteraan sosial).



c. Teori Pariwisata Berkelanjutan

Teori ini menekankan pentingnya pengelolaan pariwisata secara bertanggung jawab untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Menurut Butler (1999), pengembangan pariwisata harus memperhatikan kapasitas daya dukung lingkungan, keterlibatan masyarakat lokal, dan kesinambungan ekonomi jangka panjang.

d. *Model Integrated Coastal Zone Management (ICZM)*

ICZM adalah pendekatan lintas sektor yang menekankan integrasi antara konservasi, pemanfaatan ekonomi, dan pengaturan kawasan pesisir secara holistik. Model ini menjadi acuan penting dalam merancang kebijakan pengembangan wilayah pesisir termasuk dalam sektor pariwisata bahari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menggali potensi, tantangan, dan strategi pengembangan pariwisata bahari berbasis *blue economy* di Indonesia. Fokus utama diarahkan pada wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya kawasan Taman Nasional Wakatobi, sebagai representasi konkret dari destinasi wisata bahari yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi tinggi.

Sumber data utama berasal dari studi literatur, mencakup dokumen kebijakan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, strategi nasional ekonomi biru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta dokumen *Integrated Tourism Master Plan (ITMP)* untuk kawasan Wakatobi. Selain itu, referensi dari laporan lembaga internasional seperti UNEP dan World Bank juga digunakan untuk memperkuat kerangka konseptual penelitian.

Data dianalisis menggunakan kerangka *Triple Bottom Line (TBL)*, yaitu pendekatan evaluatif yang mencakup tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan:

1. **Dampak Lingkungan:** sejauh mana pariwisata bahari mendukung konservasi ekosistem laut dan sumber daya alam.
2. **Dampak Ekonomi:** kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.
3. **Dampak Sosial:** inklusivitas, keterlibatan masyarakat lokal, dan peningkatan kesejahteraan.

Metode ini dipilih karena memberikan pemahaman menyeluruh terhadap implementasi *blue economy* dalam sektor pariwisata, bukan hanya dari sisi ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek ekologis dan sosial yang sering kali terabaikan. Penelitian ini tidak berupaya menghasilkan generalisasi, tetapi lebih pada memberikan pemetaan strategis dan rekomendasi berbasis konteks lokal yang dapat diaplikasikan dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan pariwisata bahari ke depan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi Potensi Wilayah

Sulawesi Tenggara merupakan provinsi dengan karakteristik geografis yang didominasi oleh wilayah perairan, di mana 16 dari 17 kabupaten/kota memiliki garis pantai dan ekosistem laut yang melimpah. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian utama adalah Taman Nasional Wakatobi, yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Kawasan ini mencakup 76% spesies karang pembentuk terumbu karang perairan dangkal di dunia, menjadikannya sebagai "Amazon Lautan". Potensi ini menunjukkan bahwa Sulawesi Tenggara memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam pengembangan pariwisata bahari yang berbasis konservasi laut dan keberlanjutan.

2. Pilar *Blue Economy* dalam Pengembangan Pariwisata Bahari

Implementasi *blue economy* dalam sektor pariwisata bahari dapat dianalisis melalui tiga pilar utama:

- a. Pilar Lingkungan (*Environmental Impact*). Pengelolaan kawasan wisata bahari yang berkelanjutan sangat bergantung pada konservasi ekosistem laut. Di Wakatobi, pendekatan konservatif terhadap terumbu karang, padang lamun, dan habitat biota laut mendukung daya tarik wisata sekaligus menjaga keseimbangan ekologis.
- b. Pilar Ekonomi (*Economic Impact*). Aktivitas wisata bahari seperti diving, snorkeling, dan ekowisata telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah serta membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal. Pariwisata berbasis *blue economy* mampu mendorong ekonomi sirkular melalui sektor pendukung seperti kerajinan lokal, kuliner, dan transportasi laut.
- c. Pilar Sosial (*Social Impact*). Inklusivitas dalam pengembangan pariwisata tercermin dari keterlibatan komunitas lokal dalam penyediaan jasa wisata, pengelolaan homestay, dan partisipasi dalam pengawasan ekosistem. Program pelatihan dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah dan LSM turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi laut.

3. Integrasi Kebijakan dan Perencanaan

Blue economy telah diintegrasikan dalam dokumen strategis nasional, seperti RPJMN 2025–2029, dengan memasukkan sektor pariwisata bahari sebagai salah satu fokus pembangunan ekonomi kelautan. Selain itu, dokumen Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Wakatobi menjadi acuan dalam pengembangan pariwisata berbasis zona dan daya dukung lingkungan. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti lemahnya koordinasi antar instansi, terbatasnya infrastruktur dasar di wilayah pesisir, serta rendahnya literasi masyarakat terhadap prinsip keberlanjutan.

4. Strategi Penguatan

Untuk mengoptimalkan pengembangan pariwisata bahari berbasis *blue economy*, diperlukan strategi sebagai berikut:



- a. Peningkatan investasi hijau di sektor pariwisata dan pelabuhan wisata.
- b. Penguatan kapasitas masyarakat pesisir melalui pelatihan kewirausahaan dan konservasi.
- c. Pengembangan regulasi kawasan konservasi yang fleksibel dan adaptif terhadap dinamika lokal.
- d. Integrasi sistem pemantauan berbasis teknologi untuk memantau daya dukung ekosistem laut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengembangan pariwisata bahari berbasis *blue economy* di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara seperti Taman Nasional Wakatobi, menunjukkan potensi besar sebagai model pembangunan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, konservasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *blue economy* dalam sektor pariwisata sangat ditentukan oleh tiga pilar utama:

1. Keberlanjutan lingkungan, melalui pelestarian ekosistem laut seperti terumbu karang dan mangrove.
2. Pertumbuhan ekonomi lokal, melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM berbasis kelautan.
3. Inklusivitas sosial, melalui partisipasi aktif masyarakat pesisir dalam kegiatan wisata dan pengelolaan sumber daya.

Meskipun demikian, penerapan konsep ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya koordinasi antarinstansi, serta lemahnya pengawasan terhadap praktik wisata yang merusak. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, lembaga pendidikan, serta masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan.

Konsep *blue economy* bukan sekadar wacana pembangunan alternatif, melainkan solusi nyata untuk memastikan bahwa laut tidak hanya menjadi sumber daya, tetapi juga warisan untuk generasi masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Bappenas. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Butler, R. W. (1999). Sustainable tourism: A state-of-the-art review. *Tourism Geographies*, 1(1), 7–25.
- Coral Triangle Center. (2024). *CTC Supports Sustainable Tourism Study in Indonesia's MPAs*. <https://www.coraltrianglecenter.org/2024/09/23/ctc-supports-sustainable-tourism-study-in-indonesias-mpas/>
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Oxford: Capstone Publishing.
- Green Fins Indonesia. (2024). *Building a Bluer Future for Indonesia's Marine Tourism Industry*. <https://sevensensemedia.org/building-a-bluer-future-for-indonesias-marine-tourism-industry/>



Kaoem Telapak. (2024). *Maintaining Sustainable Maritime Tourism in Les Village*.
<https://kaoemtelapak.org/maintaining-sustainable-maritime-tourism-in-les-village/>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2022). *Strategi Nasional Ekonomi Biru*. Jakarta: KKP RI.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020). *Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Wakatobi*. Jakarta: Kemenparekraf.

Prihadi, D. J., Dhahiyat, A. P., Kristiadhi, F., & Pamungkas, W. (2024). Sustainable Tourism in 2024: The Role of Tourists and Industry in Preserving Marine Nature. *Majority Science Journal*, 2(4), 112–118.